

PENDUDUK, KETENAGAKERJAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN

Oleh :

Dyah Kusumawati*)

Abstraksi

Dewasa ini pembangunan kependudukan di Indonesia diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk karena dengan pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi maka menimbulkan berbagai macam persoalan dalam segala bidang, terutama dalam hal ketenagakerjaan. Besarnya jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang memadai menyebabkan tenaga kerja Indonesia memperoleh upah yang secara Internasional termasuk dalam kategori rendah bila dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang lainnya.

Kata kunci : penduduk, tenaga kerja, upah

A. PENDAHULUAN

Di dalam perekonomian suatu negara penduduk berfungsi ganda. Dalam konteks pasar mereka berada di sisi permintaan dan sisi penawaran. Di sisi permintaan mereka berdiri sebagai konsumen dan pada sisi penawaran mereka berdiri sebagai produsen atau sebagai tenaga kerja. Sedangkan dalam konteks pembangunan, pandangan mengenai penduduk terpecah menjadi dua. Ada yang beranggapan sebagai penghambat pembangunan dan ada pula yang beranggapan sebagai pemacu pembangunan.

Penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan karena keberadaan mereka dalam jumlah besar dan pertumbuhan yang sangat tinggi dinilai hanya menambah beban pembangunan karena dianggap bisa mengurangi pendapatan per kapita dan banyak menimbulkan masalah kependudukan seperti masalah ketenagakerjaan, kriminalitas, sosial dan sebagainya. Sementara itu penduduk dipandang sebagai pemicu pembangunan karena kegiatan mereka dalam memproduksi dan mengkonsumsi menimbulkan kegiatan perekonomian yang hidup dan semarak.

Pada jaman globalisasi seperti sekarang ini di mana migrasi internasional semakin sangat mudah berlangsung menjadikan asumsi tentang batas maksimum atau jumlah ideal penduduk menjadi tidak relevan. Tekanan masalah kependudukan atas pembangunan sesungguhnya tidak terlalu berhubungan dengan aspek jumlah penduduk melainkan lebih terkait dengan variabel-variabel lain kependudukan dan karakteristik penduduk yang bersangkutan. Variabel-variabel lain itu misalnya penyebarannya, komposisi pendudukan, kepadatan dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan karakteristik yang dimaksud adalah tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Satu hal yang penting bahwa masalah kependudukan mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang sifatnya lebih kompleks dalam pembangunan nasional, terutama kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan dan masalah ketenagakerjaan ini sudah pasti tidak akan dapat lepas dari masalah pengupahan. Apalagi bila dikaitkan dengan kualitas tenaga kerja

yang tersedia dan kemampuan penyerapan lowongan pekerjaan terhadap tenaga kerja yang membutuhkan sangatlah tidak seimbang.

B. PEMBAHASAN

Penduduk di Indonesia

Penyebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia menyebabkan timbul permasalahan-permasalahan yang kompleks. Mayoritas penduduk Indonesia justru berada di Pulau Jawa, suatu pulau yang tidak begitu besar, sekitar 7 (tujuh) persen dari luas wilayah seluruh Indonesia. Sedangkan penduduk dengan jumlah relatif sedikit justru berada di wilayah yang luasnya seperlima dari luas seluruh Indonesia, yaitu di pulau Irian Jaya. Sudah tentu Pulau Jawa menjadi pulau dengan kepadatan penduduk yang tertinggi di Indonesia.

Ketidakmerataan penduduk yang menyebar di wilayah Indonesia perlu penanganan yang serius dari pemerintah. Berbagai program diselenggarakan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Program keluarga berencana dan transmigrasi menjadi program penting dalam mengatasi permasalahan ini. Kebijakan ini menjadi bagian yang penting dan tak terpisahkan dari program-program pembangunan lainnya.

Karakteristik penduduk di Indonesia sampai saat ini diperkirakan tidak akan berubah, terutama mengenai 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Menurut jenis kelamin

Penduduk berjenis kelamin perempuan masih tetap lebih banyak daripada penduduk berjenis kelamin laki-laki.

2. Menurut komposisi umur

Dilihat dari komposisi umur, penduduk Indonesia tergolong berstruktur usia muda. Komposisi usia penduduk ini tentu saja berdampak serius pada aspek ketenagakerjaan.

3. Menurut taraf pendidikan

Taraf pendidikan penduduk Indonesia pada umumnya masih tergolong rendah. Kondisi ini lebih memprihatinkan bila kita meninjau bahwa jumlah penduduk yang berpendidikan rendah atau bahkan yang banyak tidak bersekolah ada di daerah pedesaan. Secara keseluruhan mayoritas penduduk Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar.

Ketenagakerjaan

Untuk menganalisa mengenai ketenagakerjaan maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dan penggolongan tenaga kerja yang sebenarnya. Secara garis besar **penduduk** suatu negara dapat dibedakan menjadi :

1. Tenaga Kerja

Yaitu penduduk yang tergolong dalam usia kerja. Tiap negara memberikan batasan usia yang berbeda-beda untuk usia kerjanya. Untuk Indonesia batas usia kerja yang dianut adalah minimum 10 tahun dengan tidak ada batas maksimum. Sementara untuk

batasan usia kerja menurut Bank Dunia adalah antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2. Bukan Tenaga Kerja

Yaitu penduduk yang bukan tergolong dalam usia kerja. Di Indonesia adalah penduduk yang usianya di bawah 10 tahun.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja dibagi pula menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Angkatan Kerja

Yaitu penduduk atau tenaga kerja dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.

2. Bukan Angkatan Kerja

Yaitu penduduk atau tenaga kerja dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Misalnya penduduk yang masih bersekolah, ibu-ibu pengurus rumah tangga dan penerima pendapatan tetapi tidak merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat dependen).

Angkatan Kerja

Angkatan Kerja itu sendiri juga dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Pekerja

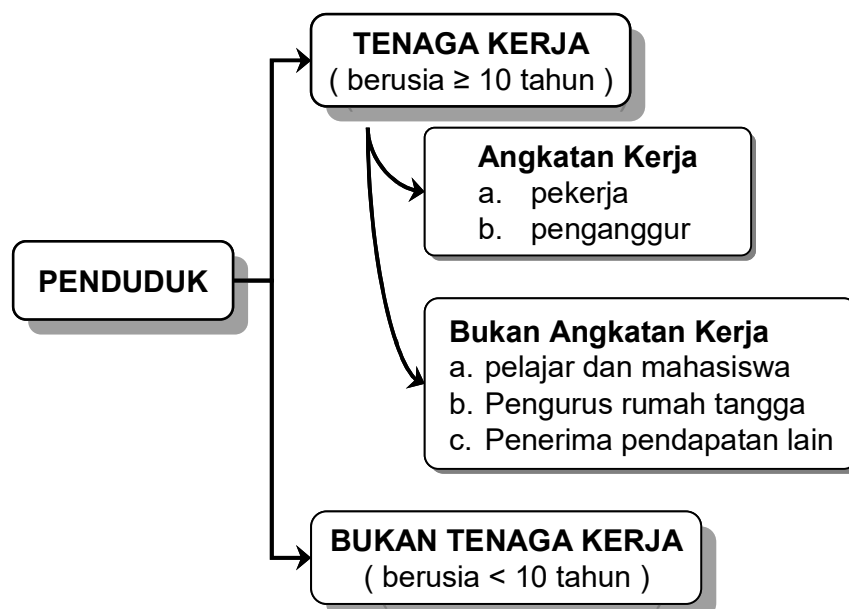
Yaitu orang-orang yang mempunyai pekerjaan, meliputi mereka yang sedang bekerja atau mereka

yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara sedang tidak dalam bekerja seperti petani yang sedang menanti panen, wanita karier yang sedang cuti melahirkan.

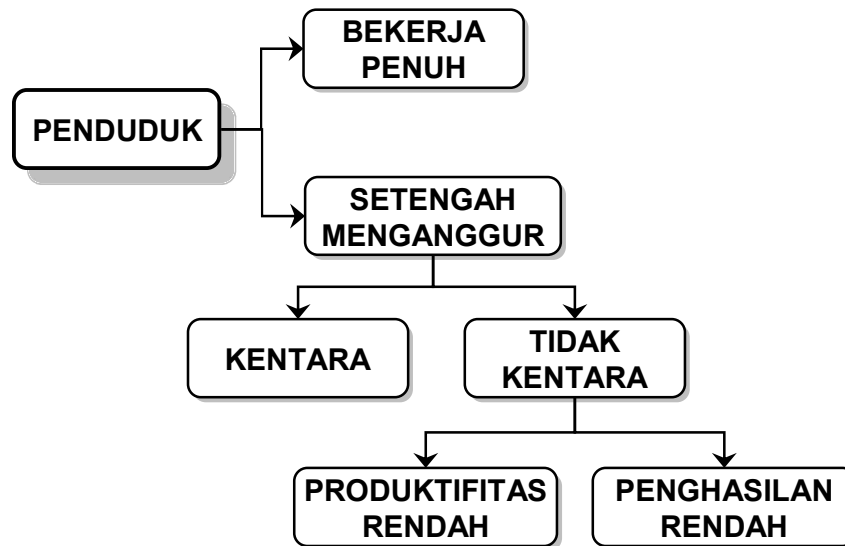
2. Pengangguran

Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, baik yang memang tidak mempunyai pekerjaan maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran semacam ini biasa disebut sebagai **penganggur terbuka**.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di bawah:



Konsep pembagian penduduk seperti di atas disebut **pendekatan angkatan kerja**. Alternatif lain yang dapat digunakan untuk pembagian penduduk bisa didasarkan pada **pendekatan pemanfaatan tenaga kerja** seperti gambar di bawah ini:



- **Bekerja penuh**
maksudnya adalah tenaga yang bersangkutan termanfaatkan secara optimal
- **Setengah menganggur**
maksudnya adalah penduduk yang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat diukur dari banyaknya penggunaan jam kerja, produktifitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membagi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, kemudian dikalikan seratus persen.

Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian negara, yaitu penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak dapat menampung semua angkatan kerja baru maka sebagian angkatan kerja baru

itu akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada.

Penciptaan lapangan kerja inilah yang sekarang menjadi salah satu masalah rawan dalam pembangunan ekonomi di tanah air. Lebih tragis lagi, pada kenyataannya bukan saja masalah daya serap lapangan kerja baru tetapi diperparah dengan adanya masalah mutu tenaga kerja baru. Kualitas tenaga kerja Indonesia seperti yang kita ketahui bersama berada pada tingkat pendidikan angkatan kerja dan produktifitas pekerja yang sudah ada yaitu masih relatif rendah.

Tingkat pendidikan angkatan kerja yang relatif rendah ini tentu saja kurang memadai untuk mendukung industrialisasi, sebuah proses pembangunan ekonomi yang justru menuntut tenaga-tenaga kerja terdidik dan terampil. Di samping itu, perlu diingat pula bahwa industrialisasi bercirikan antara lain adanya spesialisasi kerja yang dalam. Itu artinya bukan hanya tenaga-tenaga kerja terdidik dan terampil saja yang dibutuhkan tetapi juga tenaga kerja yang mempunyai spesialisasi dalam berbagai bidang kejuruan.

Dari data-data ketenagakerjaan dapat diketahui dan dihitung berbagai konsep yang berkaitan dengan tingkat pengerjaan dan tingkat pengangguran. Angka-angka yang diperoleh dari perhitungan itu berguna untuk mengenali situasi yang berlangsung di pasar kerja. Pemahaman tentang situasi pasar kerja berguna bukan saja untuk perumusan kebijaksanaan ketenagakerjaan dan penciptaan kesempatan kerja akan tetapi berguna pula untuk perumusan kebijaksanaan kependudukan dan sumber daya

manusia secara keseluruhan. Konsep-konsep yang dimaksud adalah :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pengerjaan} = \frac{\text{Jumlah Pekerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pengerjaan} + \text{Tingkat Pengangguran} = 1$$

Pekerjaan dan Tingkat Upah

Penyebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu berdasarkan :

1. Lapangan pekerjaan

Lapangan pekerjaan utama bagi rakyat Indonesia mayoritas masih pada sektor pertanian. Separuh dari jumlah pekerja masih menyandarkan sektor pertanian sebagai sumber nafkah utama. Sektor perdagangan dan sektor jasa menempati kedudukan yang kedua dan ketiga. Kemudian diurutan keempat adalah sektor industri pengolahan disusul dengan sektor pembangunan dan sektor komunikasi.

2. Status pekerjaan

Hampir sepertiga angkatan kerja yang bekerja berstatus sebagai buruh atau karyawan. Seperempat berkedudukan sebagai pekerja keluarga dan sekitar seperlima penduduk Indonesia merupakan orang-orang yang bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sini terlihat bahwa proporsi pekerja yang menjalankan usaha dengan memiliki buruh atau pekerja tetap tidak sampai satu persen. Pekerja selebihnya adalah orang-orang yang memiliki dan menjalankan pekerjaan dengan bantuan anggota keluarga atau buruh tidak tetap.

3. Jenis pekerjaan

Sejalan dengan sebaran sektoral, jenis pekerjaan mayoritas pekerja kita adalah tenaga di bidang pertanian kemudian disusul secara berturut-turut tenaga usaha penjualan, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaannya. Kemampuan tenaga kerja Indonesia untuk menjalankan fungsi ini masih relatif rendah.

Dengan adanya tiga aspek penyebaran pekerjaan angkatan kerja yang kurang memadai baik secara kuantitas maupun secara kualitas sangat berpengaruh pada tingkat upah yang mereka peroleh.

Khusus dalam bidang industri, sistem pengupahan pada umumnya dipandang sebagai suatu alat untuk mendistribusikan upah pada karyawan atau tenaga kerja. **Sistem pengupahan** sebagai alat distribusi dibedakan menjadi :

a. Sistem upah menurut produksi

Yaitu pendistribusian upah menurut jumlah prestasi yang dicapai melalui satuan-satuan produksi tertentu. Hal ini mendorong tenaga kerja untuk bekerja lebih keras lagi dan meng-upgrade diri untuk memproduksi lebih banyak.

b. Sistem upah menurut lamanya kerja

Yaitu upah yang diperhitungkan dari jumlah waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Biasanya disebut dengan upah harian, upah mingguan, upah bulanan, dan lain-lain. Sistem ini tidak membedakan umur, pengalaman dan kemampuan. Akibatnya tenaga kerja yang mempunyai kemampuan superior menjadi enggan untuk memproduksi lebih dari standar yang ada meskipun sebenarnya mereka bisa melakukan hal itu, karena penerimaan upahnya sama dengan tenaga kerja yang kemampuannya inferior. Kelebihannya, sistem ini mencegah manajemen yang pilih kasih dan deskriminasi terhadap karyawan.

c. Sistem upah menurut lamanya dinas

Yaitu menghargai tenaga kerja berdasarkan pada lamanya dinas. Sistem upah ini mendorong tenaga kerja untuk lebih setia atau loyal kepada perusahaan atau tempat mereka bekerja. Juga memberikan perasaan aman bagi tenaga kerja yang lanjut usia. Segi negatifnya, sistem ini kurang bisa memotivisir tenaga kerja dan lembaga akan diisi dengan tenaga kerja-tenaga kerja yang cukup usia sementara tenaga kerja yang berusia muda dan

berbakat akan mencari tempat yang bisa menghargai kecakapan mereka.

d. Sistem upah menurut kebutuhan

Yaitu sistem upah sesuai dengan biaya kebutuhan pokok. Sistem ini biasanya memberikan upah yang lebih besar kepada mereka yang sudah berkeluarga. Kelemahannya adalah tidak mendorong inisiatif kerja sedangkan kelebihanannya adalah memberikan perasaan aman karena nasib seseorang menjadi tanggungan perusahaan atau masyarakat. Perasaan aman ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan pengobatan, ongkos ganti perawatan, pangan, sandang dan papan.

Dari sistem pengupahan seperti di atas dan kaitannya dengan tenaga kerja Indonesia dapat dianalisa sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan sifat mayoritas manusia Indonesia atau dalam hal ini adalah tenaga kerja Indonesia bahwa mereka secara pendidikan dan ketrampilan banyak yang tidak atau belum memadai sesuai yang diharapkan dari lapangan kerja yang ada. Akibatnya mereka akan selalu mendapatkan upah yang rendah sesuai dengan kontribusi kerja mereka kepada perusahaan atau lembaga tempat mereka bekerja.

Sementara itu dalam hal sistem upah berdasarkan banyaknya produksi, di sini diperlukan tenaga kerja yang trampil sehingga dalam jangka waktu tertentu mereka bisa menghasilkan produksi di atas jumlah rata-rata. Mereka lebih aman dengan sistem upah berdasarkan lamanya kerja, lamanya dinas atau menurut kebutuhan saja. Padahal ketiga sistem upah ini banyak tidak

digunakan. Perusahaan lebih senang bila menggunakan sistem upah berdasarkan jumlah produksi atau gabungan dari keempatnya.

Rendahnya upah pekerja di Indonesia khususnya di sektor industri dapat dilihat dalam perbandingan internasional, yaitu perbandingan dengan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Upah buruh di Indonesia bukan hanya semata-mata rendah tetapi perkembangannya juga tidak begitu menggembirakan.

C. PENUTUP

Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyebaran penduduk di wilayah Indonesia dan tidak pula diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk itu sendiri mengakibatkan muncul masalah-masalah yang beraneka ragam sehingga perlu penanganan yang cukup serius.

Dewasa ini pembangunan kependudukan di Indonesia diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan kualitas penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan manusia Indonesia sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan. Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan melalui pemerataan pembangunan industri, pertanian dan jasa yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam pengendalian pertumbuhan penduduk ditempuh dengan cara gerakan keluarga berencana untuk mewujudkan

keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sedangkan dalam penyebaran penduduk, program transmigrasi lebih diarahkan pada transmigrasi swakarsa yang memperhatikan pemeliharaan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan penyebaran penduduk selaras dengan kesempatan kerja dan pembangunan daerah.

*** Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sultan Fatah Demak**

Daftar Pustaka

- Barthos, Basir, Drs, 1990, Manajemen Sumber Daya Manusia-Suatu Pendekatan Makro, Jakarta : Bumi Aksara.
- Dumairy, 1996, Perekonomian Indonesia, Jakarta : Erlangga.
- Sofyandi, Herman, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- As'ad, Moh. 2008. Psikologi Industri. Yogyakarta: Liberty.